

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG KEPARIWISATAAN DI KOTA MEDAN**

T E S I S

O L E H

**DENNY SATYA WARDHANA
NPM. 151801177**



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/4/21

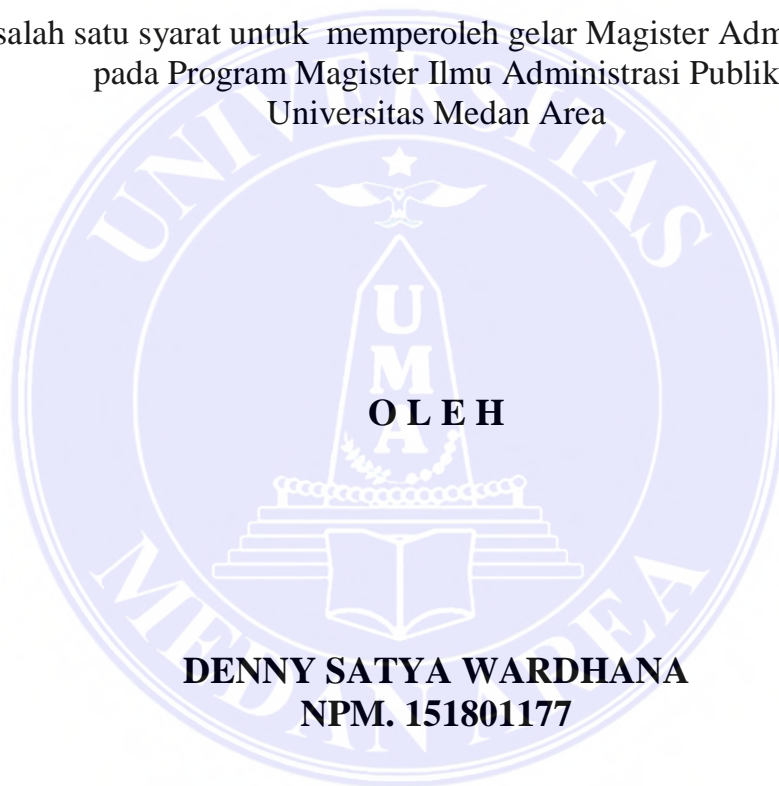
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/4/21

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG KEPARIWISATAAN DI KOTA MEDAN**

T E S I S

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Program Magister Ilmu Administrasi Publik
Universitas Medan Area



**DENNY SATYA WARDHANA
NPM. 151801177**

**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/4/21

Access From (repository.uma.ac.id)26/4/21

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG KEPARIWISATAAN DI KOTA MEDAN**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



**PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 26/4/21

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)26/4/21

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

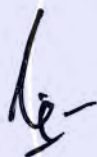
**Judul : Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014
Tentang Kepariwisata Di Kota Medan**

N a m a : Denny Satya Wardhana

N P M : 151801177

Menyetujui

Pembimbing I




Dr. Abdul Kadir, M.Si

Pembimbing II



Dr. Isnaini, SH, M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik**



Dr. Warjio, MA

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada tanggal 16 April 2019

N a m a : Denny Satya Wardhana

N P M : 151801177



Panitia Penguji Tesis

Ketua Sidang : Dr. Warjio, MA
Sekretaris : Ir. Azwana, MP
Pembimbing I : Dr. Abdul Kadir, M.Si
Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum
Penguji Tamu : Dr. Heri Kusmanto, MA

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, April 2019

Yang menyatakan,



Denny Satya Wardhana



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.4 TAHUN 2014 TENTANG KEPARIWISATAAN DI KOTA MEDAN”.

guna memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik di Universitas Medan Area. Tesis ini penulis persembahkan kepada keluarga tercinta untuk Ibu Hj.Suryati Arbie dan Ayah Alm. dr.Zainul Bahri Noer, Istri tercinta Azzura Komara Putri dan Ananda Dheffin Alden Wardhana yang tiada henti memberikan dukungan, doa dan motivasi kepada penulis selama ini.

Selama penyelesaian tesis mulai dari awal hingga akhir selesainya tesis ini penulis banyak mendapat bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Yayasan Haji Agus Salim Siregar sebagai Yayasan Pendidikan Yang profesional dan unggul yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi Mahasiswa pada Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area
2. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc., selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Prof. Dr. Ir. Hj. Retna Astuti K.,MS selaku Direktur Program Pascasarjana

Universitas Medan Area.

4. Dr. Warjio, MA selaku Ketua Program Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area
5. Dr. Abdul Kadir, SH, M.Si, selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Administrasi Publik sekaligus sebagai Pembimbing I terima kasih atas masukan, bimbingan dan ilmu pengetahuan yang diberikan
6. Dr. Isnaini, SH.Mhum. selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran dalam penulisan tesis ini.
7. Dr. Heri Kusmanto selaku Ketua Penguji yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam penulisan tesis ini.
8. Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan dalam penulisan tesis ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Program Magister Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area.
10. Bapak Drs. Agus Suryono selaku Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan beserta Kabid dan jajarannya yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
11. Kepada Paman saya, Bapak Hendra Arbie yang selalu memberikan doa dan dukungannya kepada penulis dalam penulisan tesis ini.
12. Keluarga tersayang Abangda dr.Riza Rivani, SpOG(K), kakak Malhind Desianty, SE, adik Wahyu Aditya, SE dan Rina Sari Siregar terimakasih untuk semangat kebersamaan dan doa yang diberikan.
13. Mertua tercinta, Bapak Alamsyah dan Ibu Yuyun Sri Komarawati, SH yang telah memberikan support kepada penulis selama penulisan tesis ini.

14. Keponakan penulis, Mozza Abiyyu Rivani, Moira Assyifa Rivani dan Nadhira Kamila Putri.
15. Kepada rekan sejawat di PHRI, Ibu Dewi Juita Purba, Ibu Rika F Syam, Ibu Prana Hutabarat, Ibu Eva Christina, Bapak Armin, Debby Utami dan Nadya Amelia terimakasih atas bantuan tenaga, waktu dan pikirannya dalam penyusunan tesis ini.
16. Keluarga Besar Alm. H. M. Arbie dan Direksi Garuda Hotel Group serta seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
17. Teman-teman di Program Magister Ilmu Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Medan Area yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu, atas kebaikan dan kerjasamanya dalam memberi saran dan motivasi kepada penulis selama menyelesaikan tesis ini.

Penulis menyadari masih ada kekurangan dalam penulisan tesis ini, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran membangun dari semua pihak dalam rangka penyempurnaan tesis ini. Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih dan semoga tesis ini berguna bagi kita semua.

Medan,
April 2019 Penulis,

Denny Satya Wardhana
NIM. 151801177

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG KEPARIWISATAAN DI KOTA MEDAN

N a m a : Denny Satya Wardhana
N P M : 151801177
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Pembimbing I : Dr. Abdul Kadir, SH, M.Si
Pembimbing II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang saat ini sedang berkembang pesat di Indonesia. Hal ini disebabkan pariwisata mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia khususnya sebagai salah satu penghasil devisa negara. Jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke Sumatera Utara di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 35%. Kondisi pariwisata di Kota Medan saat ini bisa jadi tidak memberikan dampak besar bagi perkembangan sektor wisata di Kota Medan apalagi dengan keadaan bahwa di luar kota Medan banyak berkembang destinasi wisata baru. Keadaan demikian memberikan dampak buruk pada perkembangan pariwisata di Kota Medan. Oleh karena itu, pemerintah Kota Medan melalui peraturan dan kebijakan daerah harus memberikan sikap dan tindakan jelas dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan sektor pariwisata di Kota Medan. Sehubungan dengan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai judul “Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kepariwisatan di Kota Medan”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan dan Asosiasi Pariwisata mewakili dari PHRI. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam terkait sejauh mana implementasi dari Perda No.4 Tahun 2014 ini telah terlaksana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan dari Perda No.4 Tahun 2014 ini masih dalam proses tahap perbaikan. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan pariwisata antara lain standarisasi Sumber Daya Manusia, revitalisasi objek wisata dan membuat objek-objek wisata yang baru. Sedangkan faktor hambatan yang membuat implementasi Perda menjadi terhambat adalah minimnya anggaran dana yang dikeluarkan oleh pemerintah, sumber daya yang tidak mumpuni, sarana dan prasarana yang kurang baik serta kurangnya mempromosikan kebudayaan lokal.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi Wisatawan, Kota Medan

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2014 ABOUT TOURISM IN THE MEDAN CITY

Name : Denny Satya Wardhana
N P M : 151801177
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Advisor I : Dr. Abdul Kadir, SH, M.Si
Advisor II : Dr. Isnaini, SH, M.Hum

Tourism is one of the development sectors that is currently developing rapidly in Indonesia. Because tourism has a very important role in Indonesia's development, especially as one of the country's foreign exchange earners. The number of visits of tourists visiting North Sumatra in 2019 decreased by 35%. The current condition of tourism in the city of Medan may not have a major impact on the development of the tourism sector in the city of Medan especially with the situation that outside the city of Medan. There are many new tourist destinations developing. Such conditions have a negative impact on tourism development in the city of Medan. Therefore, the City of Medan government through regional regulations and policies must provide clear attitudes and actions in order to improve and develop the tourism sector in Medan City. In connection with this, researchers are interested in conducting research on the title "Implementation of Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 about Tourism in the City of Medan". The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. The informants in this study were the Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan and the Tourism Association representing PHRI. Data collection was done by in-depth interview method related to the extent to which the implementation of Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 had been implemented. The results of the study show that the implementation of Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 is still in the process of improvement. The factors that influence the increase in tourism include the standardization of Human Resources, revitalization of tourism objects and creating new tourist objects. Whereas the obstacle factors that make the implementation of the Perda become hampered are the lack of budget funds issued by the government, inadequate resources, poor facilities and infrastructure and a lack of promoting local culture.

Kata Kunci : Kebijakan Publik, Implementasi, Pariwisata, Kota Medan

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian.....	4
1.5. Kerangka Pemikiran.....	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik.....	6
2.1.1 Tahapan Kebijakan Publik.....	8
2.1.2 Implementasi Kebijakan.....	9
2.1.3 Model Implementasi yang digunakan	9
2.1.4 Kepariwisata.....	14
2.1.5 Pengembangan Pariwisata.....	16
2.2 Gambaran Umum Kota Medan	24
2.2.1	Geografis 24
2.2.2	Ekonomi 24
2.2.3	Administratif 28
2.2.4	Kependuduk an..... 29
2.2.5	Objek Wisata Kota Medan..... 29
2.2.6	Wisata

Kuliner Kota Medan.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	32
3.2 Lokasi Penelitian	32
3.3 Informan Penelitian	32
3.4 Sumber Data	33
3.5 Teknik Pengumpulan Data	34
3.6 Definisi Konseptual	35
3.7 Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	27
4.1. Dinas Pariwisata Kota Medan	37
4.2. Visi dan Misi Dinas Pariwisata Kota Medan.....	38
4.3. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	39
4.4. Struktur Organisasi...,	41
4.5. Implementasi Perda No.4 Tahun 2014 tentang Kepariwisataaan di Kota Medan	41
4.6. Faktor Pendukung dan faktor Hambatan dalam Peningkatan Kepariwisataaan di Kota Medan.	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1. Kesimpulan.....	51
5.2. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Landasan Teori.....	17
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kota Medan.....	31



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Selesai Penelitian	46
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian	47



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang saat ini sedang berkembang pesat di Indonesia. Hal ini disebabkan pariwisata mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia khususnya sebagai salah satu penghasil devisa negara. Perkembangan pariwisata saat ini merupakan fenomena global dengan melibatkan jutaan manusia baik di kalangan masyarakat industri pariwisata maupun penggunanya. Usaha individu untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonominya menjadikan mereka berusaha untuk menciptakan lapangan kerja sendiri dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh dirinya sendiri dan potensi lain, seperti pariwisata.

Data detil untuk Provinsi Sumatera Utara pada periode Januari-Desember 2018, jumlah wisman yang berkunjung di Sumatera Utara mengalami penurunan (14.52 %) dibandingkan periode yang sama tahun 2017, yaitu dari 270.792 kunjungan tahun 2017 turun menjadi 231.465 kunjungan di tahun 2018.

Berdasarkan hasil statistik yang dimuat oleh (BPS Sumut, 2019), Kunjungan wisatawan mancanegara ke Sumatra Utara pada Januari 2019 turun (35%) dibandingkan dengan kunjungan pada Desember 2018 dari 21.769 kunjungan menjadi 14.149 kunjungan. Dari empat pintu masuk, jumlah penurunan tertinggi berasal dari Pelabuhan Laut Tanjung Balai Asahan yakni sebesar (65,1%) dari 441 kunjungan pada Desember 2018 menjadi 154 kunjungan pada Januari 2019. Di Bandara Kualanamu, wisman yang datang pada Januari 2019 turun (34,5%) yakni

19.948 kunjungan menjadi 13.056 kunjungan pada Desember 2018. Sementara itu, dari Bandara Silangit turun (32,5%) dari 1.364 kunjungan pada Desember 2018 menjadi 920 kunjungan pada Januari 2019. Terakhir, dari Pelabuhan Laut Belawan, jumlah kedatangan wisman naik yakni sebesar (18,7%) dari 16 kunjungan menjadi 19 kunjungan. Dari uraian data di atas, menunjukkan bahwa adanya penurunan yang signifikan terhadap jumlah kunjungan wisatawan.

Kota Medan sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Utara menjadi pintu gerbang masuknya wisatawan ke Sumatera Utara, yang sampai sekarang ini terus berkembang sehingga mendorong para investor untuk ke Kota Medan dalam rangka tujuan wisata maupun bisnis. Untuk menjadikan Medan sebagai daerah tujuan wisata, Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pariwisata Kota Medan bertugas melaksanakan pemasaran dan membuat perencanaan guna meningkatnya kunjungan wisatawan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal. Sejalan dengan pelaksanaan tugas tersebut maka Dinas Pariwisata membuat Rencana Kerja (Renja) setiap tahun untuk mencapai visi yaitu mewujudkan Kota Medan sebagai daerah tujuan wisata.

Sesuai dengan Peraturan daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2014 disebutkan pada Bab IV mengenai pembangunan kepariwisataan pada pasal 6 yang menjelaskan bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6

meliputi bagian-bagian yang terdiri dari 4 jenis usaha yaitu : industri pariwisata, terdiri dari akomodasi, jasa boga dan restoran, transportasi dan jasa angkutan, tempat penukaran uang (*money changer*), atraksi wisata, cindramata, biro perjalanan. Ada juga seperti destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan juga kelembagaan kepariwisataan. Di dalam Perda No.4 Tahun 2014 tersebut, terdapat ketentuan- ketentuan lebih khusus mengenai izin usaha pariwisata di Kota Medan yang diatur dalam Peraturan Walikota No.29 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti menyebutkan sulitnya untuk membuat surat izin usaha atau memperpanjang izin usaha. Sehingga perlu adanya kajian ulang mengenai peraturan tersebut.

Kondisi pariwisata di Kota Medan saat ini bisa jadi tidak memberikan dampak besar bagi perkembangan sektor wisata di Kota Medan apalagi dengan keadaan bahwa diluar kota Medan banyak berkembang destinasi wisata baru, seperti kawasan seputaran danau toba, simalungun, dairi dan mandailing natal. Destinasi wisata didaerah tersebut didukung dengan kondisi sarana dan prasarana yang semakin baik, seperti telah beroperasinya bandara silangit, dan bandara di Tapanuli sebagai bentuk mempermudah akses wisatawan untuk langsung berkunjung. Keadaan demikian memberikan dampak buruk pada perkembangan pariwisata di Kota Medan. Oleh karena itu, pemerintah Kota Medan melalui peraturan dan kebijakan daerah harus memberikan sikap dan tindakan jelas dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan sektor pariwisata di Kota Medan.

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang

bertujuan untuk menggambarkan Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 tahun 2014 tentang Kepariwisata di Kota Medan.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah:

1. Bagaimana implementasi Perda No. 4 tahun 2014 tentang Kepariwisata di Kota Medan ?
2. Bagaimana Apa saja faktor-faktor pendukung dan hambatan dalam peningkatan kepariwisataan di Kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Implementasi Perda No. 4 tahun 2014 tentang Kepariwisata di Kota Medan
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung & hambatan dalam peningkatan kepariwisataan di Kota Medan

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah :

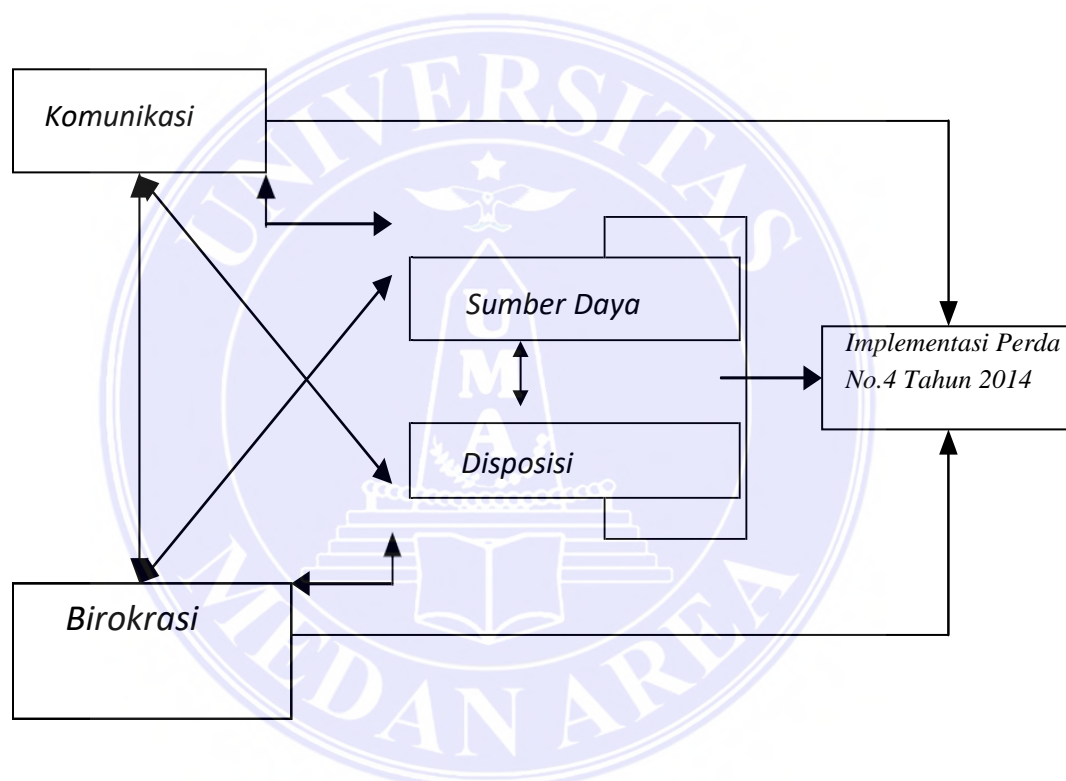
a. Dinas Pariwisata Kota Medan

Memberikan gambaran mengenai sejauh mana proses implementasi Perda No.4 Tahun 2014 di Kota Medan sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan kualitas program yang sudah ada ataupun program yang akan dibuat terkait kepariwisataan di Kota Medan.

b. Asosiasi Pariwisata

Memberikan gambaran bagi Asosiasi Pariwisata tentang Implementasi Perda No.4 Tahun 2014 mengenai Kepariwisataan di Kota Medan agar turut membantu Pemerintahan dalam menjalankan program terkait guna meningkatkan kualitas kepariwisataan di Kota Medan.

1.5 Landasan Teori



Gambar 1.1 Model Pendekatan Implementasi

Sumber: George C. Edward III, 1980

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan Publik

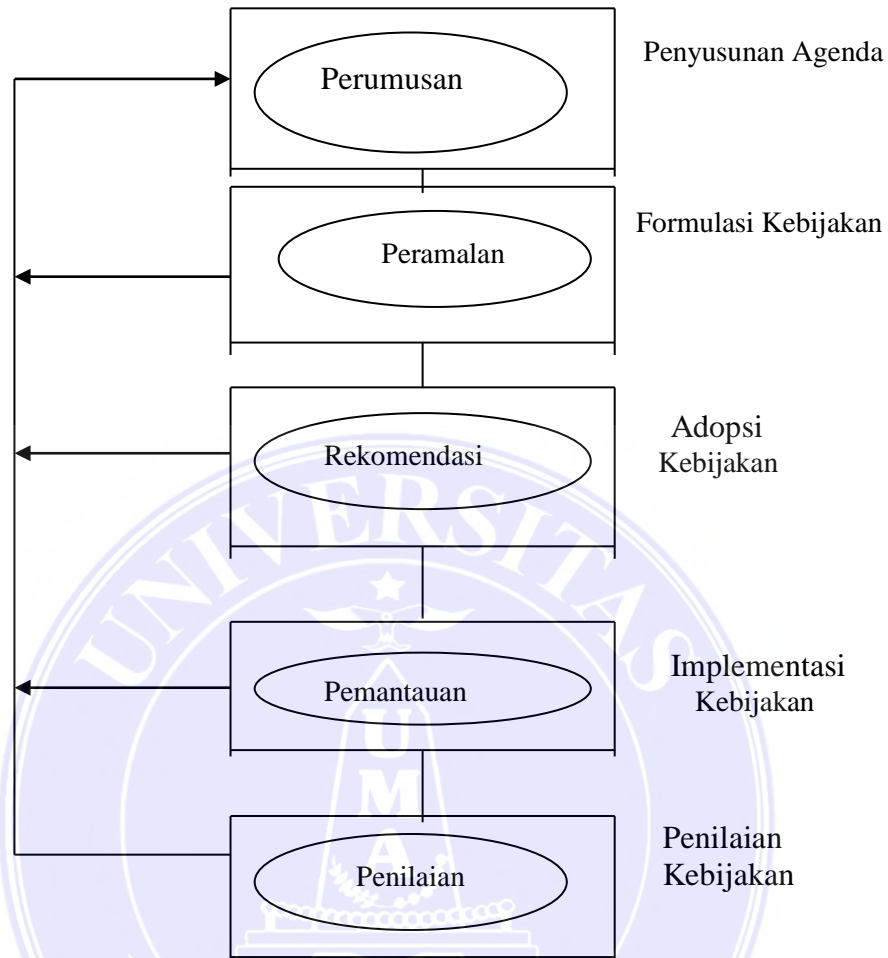
Kebijakan secara etimologi, istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris “*policy*”. Akan tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Padahal apabila dicermati berdasarkan tata bahasa, istilah kebijaksanaan berasal dari kata “*wisdom*”.

Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di tengah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

James E. Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “*a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern*” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Menurut William Dunn setiap kebijakan publik mencakup beberapa tahapan yang saling bergantung menurut urutan waktu : penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Aktivitas kebijakan yang termasuk dalam prosedur analisis kebijakan seperti yang digambarkan oleh William Dunn di bawah ini :

Gambar 2.1 Kedekatan Prosedur Analisis Kebijakan Dengan Tipe-Tipe Pembuatan Kebijakan



(Sumber : Dunn, William 1998)

Menurut Winarno (2002:17) bahwa, kebijakan publik secara garis besar mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik meliputi tiga kegiatan pokok yaitu :

1. Perumusan kebijakan publik
2. Implementasi kebijakan publik
3. Evaluasi kebijakan publik

Dari definisi para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah: “Serangkaian keputusan kebijaksanaan yang diambil seorang atau sekelompok orang untuk mewujudkan tujuan-tujuan tertentu di dalam masyarakat”.

2.1.1 Tahapan Kebijakan Publik

Menurut *William Dunn (1998)*, tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut :

1. Tahapan penyusunan agenda (*agenda setting*)

Kelompok masyarakat seperti partai politik, organisasi masyarakat, serikat ataupun kelompok lainnya akan menyuarakan isu mereka kepada pemerintah. Isu yang disampaikan oleh mereka akan bersaing untuk dapat masuk kedalam agenda kebijakan. Para pembuat kebijakan akan memilih isu yang akan mereka angkat sedangkan isu yang lain ada yang tidak tersentuh sama sekali dan sebagian lagi akan di diamkan dalam waktu yang cukup lama.

2. Tahapan formulasi kebijakan (*policy formulation*)

Isu yang telah masuk ke dalam agenda kebijakan dan dibahas oleh para pembuat kebijakan akan di definisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk kedalam agenda kebijakan. Dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk memecahkan masalah.

3. Adopsi kebijakan (*policy adoption*)

Dari sekian alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumusan kebijakan pada akhirnya salah satu alternative kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislative, consensus antara direktur lembaga atau keputusan pengadilan.

4. Implementasi kebijakan (*policy implementation*)

Kebijakan yang sudah diadopsi kemudian dirangkum melalui program- program yang harus di implementasikan yakni di laksanakan oleh badan administrasi maupun agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil akan dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia, pada tahap ini berbagai kepentingan akan bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana namun beberapa yang lain mungkin akan di tentang oleh para pelaksana.

5. Evaluasi kebijakan (*policy evaluation*)

Pada tahap ini kebijakan yang telah di jalankan akan dinilai atau di evaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan public yang pada dasarnya di buat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini memperbaiki masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karna itu, tentukanlah kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan.

2.1.2 Implementasi Kebijakan Publik

Pengertian implementasi kebijakan menurut Edward III adalah sebagai berikut:

“policy implementation as we have seen is the stage of policy making between the

establishment of a policy such as the passage of a legislative act, the issuing of an executive order, the handing down of a judicial decision, or the promulgation of a regulatory rule and the consequences of the policy for the people whom it affects". (Edward III, 1980:1).

Kata implementasi (implementation) berasal dari kata dasar *verb implement*, menurut kamus *Oxford-Advanced Learner's Dictionary* (1995:595) bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to put something into effect* (menggerakkan sesuatu untuk menimbulkan dampak/akibat); *to carry something out* (melaksanakan sesuatu). Dengan demikian implementasi menurut arti kata harfiah adalah pelaksanaan sesuatu, sehingga implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai pelaksanaan suatu kebijakan (keputusan, Peraturan DPRD Kota Medan ataupun peraturan perundang-undangan lainnya).

Konsep implementasi kebijakan bervariasi tergantung dari sudut pandang atau pendekatan yang digunakan. Implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses menurut pendapat Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2002:102) membatasi implementasi kebijakan sebagai berikut :

“Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok-kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-

keputusan kebijakan. Tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut.”

Dengan demikian pada tahap implementasi kebijakan ini mencakup usaha-usaha mengubah keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional maupun usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil. Dan tahap implementasi baru terjadi setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan. Namun demikian suatu implementasi kebijakan tidak selalu berhasil adakalanya tujuan tidak tercapai. Suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai disebut sebagai *implementation gap* (Andrew Dunsire dalam Abdul Wahab, 1997:61). Besar kecilnya perbedaan tersebut sedikit banyak tergantung pada *implementation capacity* dari organisasi/aktor atau kelompok organisasi/aktor yang dipercaya untuk mengemban tugas mengimplementasikan kebijakan tersebut (Walter Williams dalam Abdul Wahab, 1997 : 61).

Lebih lanjut Hogwood dan Gunn (dalam Abdul Wahab) membagi pengertian kegagalan kebijakan dalam 2 (dua) kategori, yaitu :

1. *Non implementation* (tidak terimplementasikan) mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihak-pihak yang terlibat didalam pelaksanaannya tidak mau bekerja sama, atau mereka telah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau karena mereka tidak

sepenuhnya menguasai persoalan, atau kemungkinan permasalahan yang digarap diluar jangkauan kekuasaannya, sehingga betapapun gigih usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup mereka tanggulangi.

2. *Unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil) terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki. Hal ini biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor:

1. Pelaksanaannya jelek (*bad execution*)s
2. Kebijakannya sendiri memang jelek (*bad policy*)
3. Kebijakan itu sendiri bernasib jelek (*bad luck*)
4. Sejak awal kebijakan tersebut memang jelek, dalam artian

telah dirumuskan secara sembrono, tidak didukung oleh informasi yang memadai, alasan yang keliru, atau asumsi-asumsi dan harapan-harapan yang tidak realistis.”

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa peran pelaksana implementasi sangat menentukan terimplementasikannya suatu kebijakan sehingga pelaksana implementasi harus benar-benar memahami kebijakan yang akan dilaksanakan. Di samping itu faktor eksternal perlu diperhatikan pula untuk dapat mendukung bagi kelancaran dalam implementasi kebijakan tersebut. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi setelah suatu kebijakan dibuat dan dirumuskan adalah subyek implementasi kebijakan.

Selanjutnya implementasi kebijakan dapat dianalisa dari beberapa pendekatan meliputi pendekatan struktural, pendekatan prosedural, pendekatan

manajerial, pendekatan berperilaku dan pendekatan politik seperti yang ditulis oleh Abdul Wahab (1997:111-120). Dalam penelitian ini implementasi kebijakan dianalisa dengan menggunakan pendekatan prosedural. Dilihat dari pendekatan prosedural maka implementasi dipandang sebagai proses prosedural. Pendekatan prosedural menjelaskan implementasi dari proses prosedur yang tepat dijalankan dalam implementasi kebijakan.

Definisi prosedur (*procedure*) menurut Richard F. Neulschel (dalam Jogiyanto, 2001:1), sebagai berikut : “Suatu prosedur adalah suatu urutan *operasi klerikal* (tulis menulis), biasanya melibatkan beberapa orang di dalam satu atau lebih departemen, yang diterapkan untuk menjamin penanganan yang seragam dari transaksi-transaksi bisnis yang terjadi.”

Pendapat yang lain dikemukakan oleh Jerry FitzGerald, Ardra F. FitzGerald dan Warren D. Stallings, Jr., (dalam Jogiyanto, 2001:2) mendefinisikan prosedur sebagai berikut : “Suatu prosedur adalah urutan yang tepat dari tahapan-tahapan instruksi yang menerangkan apa (*what*) yang harus dikerjakan, siapa (*who*) yang mengerjakannya, kapan (*when*) dikerjakan dan bagaimana (*how*) mengerjakannya.”

Dengan demikian yang dimaksud prosedur adalah urutan tahapan-tahapan instruksi bagaimana suatu kegiatan dilaksanakan menyangkut pelaksana, waktu, tata cara dan aturan maupun ketentuan yang berlaku yang dijalankan. Dengan demikian implementasi kebijakan yang dimaksud adalah pelaksanaan suatu kebijakan sesuai tata cara, aturan maupun ketentuan yang berlaku. Dimana yang dimaksud dengan tata cara adalah urutan-urutan bagaimana kegiatan

dilakukan, aturan adalah hal-hal yang bersifat mengatur sebagai pegangan dalam melaksanakan kegiatan dan ketentuan adalah hal-hal yang bersifat mengikat berkaitan dengan aturan yang ada.

Jadi, implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

2.1.3 Model Implementasi yang digunakan

Dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan model teori implementasi George Edwards III (1980) yang dipengaruhi oleh empat variable, yaitu :

1. Komunikasi

George Edwards III (1980) , menyatakan bahwa ada tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

- A. Transmisi, yaitu pengetahuan implementor tentang peraturan daerah tentang kepariwisataan pada dinas pariwisata. Sebelum implementor dapat mengimplementasikan suatu keputusan, implementor harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.
- B. Kejelasan, yaitu pengetahuan implementor tentang tahap-tahap implementasi peraturan daerah pada dinas pariwisata. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak

hanya harus diterima para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi harus jelas. Ketidakjelasan komunikasi akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah.

- C. Konsistensi, yaitu implementasi peraturan daerah pada dinas pariwisata harus sesuai dengan peraturan yang ada. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung dengan efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.

2. Sumber Daya

- a. Staf, yaitu ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam proses implementasi peraturan daerah pada dinas pariwisata.
- b. Informasi, yaitu bagaimana cara implementor dalam menyelesaikan kebijakan peraturan daerah pada dinas pariwisata kota medan serta mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, artinya sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksana (juklak).
- c. Wewenang, yaitu hak masing-masing implementor dalam mengimplementasikan peraturan daerah tentang peraturan daerah pada dinas pariwisata.
- d. Fasilitas, yaitu fasilitas yang dimiliki oleh kantor Dinas Pariwisata Kota Medan yang mendukung implementasi peraturan daerah kota medan.

3. Disposisi

- a. Komitmen yang dimiliki aparatur kantor Dinas Pariwisata Kota Medan dalam pelaksanaan peraturan daerah tentang peraturan daerah tentang

kepariwisataan.

- b. Kejujuran aparatur kantor Dinas Pariwisata Kota Medan terkait tugas dan Fungsinya sebagai pelaksana peraturan daerah Kota Medan.

4. Struktur Birokrasi

a. *Standards Operating Procedures* (SOP) adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya. Dengan menggunakan SOP, para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia.

b. Fragmentasi yaitu mengenai pandangan-pandangan yang sempit dari banyak lembaga birokrasi.

2.1.4 Kepariwisataan

Pembangunan kepariwisataan pada umumnya diarahkan sebagai sektor andalan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan daerah, memberdayakan perekonomian masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha. Serta meningkatkan pengenalan dan pemasaran produk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mulyadie, 2015). Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, menyatakan bahwa :

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai

fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.

4. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

2.1.5 Pengembangan Pariwisata

Pengembangan bidang pariwisata merupakan suatu hal yang sangat perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah, mengingat banyak sekali keuntungan atau manfaat yang bisa diambil dari kegiatan pariwisata, antara lain dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan dan meratakan pendapatan masyarakat serta memperkenalkan seni budaya daerah. Dalam melakukan pengembangan pariwisata dibutuhkan berbagai pendukung untuk memperlancar jalannya kegiatan. Antara lain sumber daya manusia yang berkualitas, adanya dana yang cukup memadai, didukung sarana dan prasarana serta kebijakan dari Pemerintah Daerah yang memprioritaskan bidang pariwisata.

Unsur pokok yang harus mendapat perhatian guna menunjang pengembangan pariwisata di daerah tujuan wisata yang menyangkut perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pengembangannya meliputi 5 unsur, yaitu :

- 1) Objek dan daya tarik wisata,
- 2) Prasarana wisata,
- 3) Sarana wisata,

- 4) Infrastruktur,
- 5) Masyarakat/lingkungan

1. Objek dan Daya Tarik Wisata

Menurut Undang-Undang Kepariwisata No. 10 tahun 2009 Pasal 1 mengatakan bahwa : daya tarik wisata adalah sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Dapat disimpulkan beberapa unsur yang terkandung dalam pengertian tersebut, yaitu :

- (1) Setiap daya tarik wisata memiliki keunikan, keindahan;
- (2) Daya tarik dapat berupa alam, budaya, atau hasil karya manusia yang berseni tinggi dan layak untuk dijadikan suatu produk;
- (3) Sasaran utama adalah wisatawan.

Objek wisata sebaiknya memiliki kriteria-kriteria yang memenuhi syarat serta berpotensi sehingga layak untuk dijual. Ada tiga kriteria yang menentukan suatu objek wisata dapat diminati wisatawan, yakni:

- (1) *Something To See* adalah objek wisata tersebut harus mempunyai sesuatu yang biasa dilihat atau dijadikan tontonan oleh pengunjung wisata. Dengan kata lain objek tersebut harus mempunyai daya tarik khusus yang mampu untuk menyedot minat dari wisatawan yang berkunjung ke daerah tersebut.
- (2) *Something To Do* adalah agar wisatawan bisa melakukan sesuatu yang berguna untuk memberikan perasaan senang, bahagia, relax, berupa fasilitas rekreasi baik arena bermain atau tempat makan, terutama makanan khas dari tempat tersebut

sehingga mampu membuat wisatawan lebih betah tinggal disana.

(3) *Something To Buy* adalah fasilitas untuk wisatawan berbelanja yang pada umumnya adalah ciri khas atau ikon dari daerah tersebut, sehingga bisa dijadikan sebagai oleh-oleh (Yoeti 1985:164).

Objek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan ke suatu Daerah Tujuan Wisata. Objek dan daya tarik wisata merupakan salah satu unsur dalam produk pariwisata yang harus mendapat perhatian khusus dari berbagai pihak guna menunjang perkembangan kepariwisataan. Daya tarik wisata yang juga disebut objek wisata merupakan potensi yang menjadi pendorong kehadiran wisatawan. Pengusahaan objek dan daya tarik wisata di kelompokkan kedalam:

- (1) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam,
- (2) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata budaya,
- (3) Pengusahaan objek dan daya tarik wisata minat khusus.

Dalam kedudukannya yang sangat menentukan itu maka daya tarik wisata harus dirancang dan dibangun/dikelola secara profesional sehingga dapat menarik wisatawan untuk datang. Membangun suatu objek wisata harus dirancang sedemikian rupa berdasarkan kriteria tertentu. Umumnya daya tarik suatu objek wisata berdasar pada:

- (1) Adanya sumber daya yang dapat menimbulkan rasa senang, indah, nyaman dan bersih.
- (2) Adanya aksesibilitas yang tinggi untuk dapat mengunjunginya.
- (3) Adanya ciri khusus/spesifikasi yang bersifat langka.

(4) Adanya sarana/prasarana penunjang untuk melayani para wisatawan yang hadir.

(5) Objek wisata alam mempunyai daya tarik tinggi karena keindahan alam pegunungan, sungai, pantai, pasir, hutan, dan sebagainya.

(6) Objek wisata budaya mempunyai daya tarik tinggi karena memiliki nilai khusus dalam bentuk atraksi kesenian upacara-upacara adat, nilai luhur yang terkandung dalam suatu objek buah karya manusia pada masa lampau.

2. Prasarana wisata

Prasarana wisata adalah sumber daya alam dan sumber daya buatan manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan, dan lain sebagainya. Untuk kesiapan objek-objek wisata yang akan dikunjungi oleh wisatawan di daerah tujuan wisata, prasarana wisata tersebut perlu dibangun dengan disesuaikan dengan lokasi dan kondisi objek wisata yang bersangkutan. Pembangunan prasarana wisata yang mempertimbangkan kondisi dan lokasi akan meningkatkan aksesibilitas suatu objek wisata yang pada gilirannya akan dapat meningkatkan daya tarik objek wisata itu sendiri.

Di samping berbagai kebutuhan yang telah disebutkan di atas, kebutuhan wisatawan yang lain juga perlu disediakan di daerah tujuan wisata, seperti bank, apotik, rumah sakit, pom bensin, pusat-pusat perbelanjaan, barber, dan sebagainya. Dalam melaksanakan pembangunan prasarana wisata diperlukan koordinasi yang mantap antara instansi terkait bersama dengan instansi pariwisata di berbagai tingkat. Dukungan instansi terkait dalam membangun prasarana wisata

sangat diperlukan bagi pengembangan pariwisata di daerah.

3. Sarana Wisata

Sarana wisata merupakan kelengkapan daerah tujuan wisata yang diperlukan untuk melayani kebutuhan wisatawan dalam menikmati perjalanan wisatanya. Pembangunan sarana wisata disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan baik kuantitatif maupun kualitatif. Lebih dari itu selera pasar pun dapat menentukan tuntunan sarana yang dimaksud. Berbagai sarana wisata yang harus disediakan di daerah tujuan wisata adalah hotel, biro perjalanan, alat transportasi, restoran dan rumah makan serta sarana pendukung lainnya. Tak semua objek wisata memerlukan sarana yang sama atau lengkap. Pengadaan sarana wisata tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan wisatawan. Sarana wisata kuantitatif menunjukkan pada jumlah sarana wisata yang harus disediakan, dan secara kuantitatif yang menunjukkan pada mutu pelayanan yang diberikan dan yang tercermin pada kepuasan wisatawan yang memperoleh pelayanan. Dalam hubungannya dengan jenis dan mutu pelayanan sarana wisata di daerah tujuan wisata telah disusun suatu standart wisata yang baku, baik secara nasional dan secara internasional, sehingga penyedia sarana wisata tinggal memilih atau menentukan jenis dan kualitas yang akan disediakan.

4. Tata Laksana/Infrastruktur

Infrastruktur adalah situasi yang mendukung fungsi sarana dan prasarana wisata, baik yang berupa sistem pengaturan maupun bangunan fisik di atas permukaan tanah dan di bawah tanah seperti:

- a. Sistem pengairan, distribusi air bersih, sistem pembuangan air limbah yang membantu sarana perhotelan/restoran.
- b. Sumber listrik dan energi serta jaringan distribusikannya yang merupakan bagian vital bagi terselenggaranya penyediaan sarana wisata yang memadai.
- c. Sistem jalur angkutan dan terminal yang memadai dan lancar akan memudahkan wisatawan untuk mengunjungi objek-objek wisata.
- d. Sistem komunikasi yang memudahkan para wisatawan untuk mendapatkan informasi maupun mengirimkan informasi secara cepat dan tepat.
- e. Sistem keamanan atau pengawasan yang memberikan kemudahan diberbagai sektor bagi para wisatawan. Keamanan di terminal, di perjalanan, di pusat-pusat perbelanjaan, akan meningkatkan daya tarik suatu objek wisata maupun daerah tujuan wisata.

Di sini perlu ada kerjasama yang mantap antara petugas keamanan, baik swasta maupun pemerintah, karena dengan banyaknya orang di daerah tujuan wisata dan mobilitas manusia yang begitu cepat membutuhkan sistem keamanan yang ketat dengan para petugas yang selalu siap setiap saat. Infrastruktur yang memadai dan terlaksana dengan baik di daerah tujuan wisata akan membantu meningkatkan fungsi sarana wisata, sekaligus membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

5. Masyarakat/Lingkungan

Daerah dan tujuan wisata yang memiliki berbagai objek dan daya tarik wisata akan mengundang kehadiran wisatawan.

- a. Masyarakat

Masyarakat di sekitar objek wisata adalah yang akan menyambut kehadiran wisatawan tersebut dan akan memberikan layanan yang diperlukan oleh para wisatawan. Untuk ini masyarakat di sekitar objek wisata perlu mengetahui berbagai jenis dan kualitas layanan yang dibutuhkan oleh para wisatawan. Dalam hal ini pemerintah melalui instansi-instansi terkait telah menyelenggarakan berbagai penyuluhan kepada masyarakat. Salah satunya adalah dalam bentuk bina masyarakat sadar wisata. Dengan terbinanya masyarakat yang sadar wisata akan berdampak positif karena mereka akan memperoleh keuntungan dari para wisatawan yang membelanjakan uangnya.

b. Lingkungan

Di samping masyarakat di sekitar objek wisata, lingkungan alam disekitar objek wisata pun perlu diperhatikan dengan seksama agar tak rusak dan tercemar. Lalu lalang manusia yang terus meningkat dari tahun ke tahun dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem fauna dan flora disekitar objek wisata. Oleh sebab itu perlu adanya upaya menjaga kelestarian lingkungan melalui penegakan berbagai aturan dan persyaratan dalam pengelolaan suatu objek wisata.

c. Budaya

Lingkungan masyarakat dalam lingkungan alam di suatu objek wisata merupakan lingkungan budaya yang menjadi pilar penyangga kelangsungan hidup suatu masyarakat. Oleh karena itu lingkungan budaya ini pun kelestariannya tidak boleh tercemar oleh budaya asing, tetapi harus ditingkatkan kualitasnya sehingga dapat memberikan kenangan yang mengesankan bagi tiap wisatawan yang berkunjung.

2.2 Gambaran Umum Kota Medan

2.2.1 Geografis

Sebagai salah satu daerah otonom berstatus kota di Provinsi Sumatera Utara, kedudukan, fungsi dan peranan Kota Medan cukup penting dan strategis secara regional. Bahkan sebagai Ibukota Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan sering digunakan sebagai barometer dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah. Secara geografis, Kota Medan memiliki kedudukan strategis sebab berbatasan langsung dengan Selat Malaka di bagian Utara, sehingga relatif dekat dengan kota-kota / negara yang lebih maju seperti Pulau Penang Malaysia, Singapura dan lain-lain. Demikian juga secara demografis Kota Medan diperkirakan memiliki pangsa pasar barang/jasa yang relatif besar. Hal ini tidak terlepas dari jumlah penduduknya yang relatif besar dimana tahun 2007 diperkirakan telah mencapai 2.083.156 jiwa.

Demikian juga secara ekonomis dengan struktur ekonomi yang didominasi sektor tertier dan sekunder, Kota Medan sangat potensial berkembang menjadi pusat perdagangan dan keuangan regional/nasional (Dinas Pariwisata Kota Medan, 2013 : 1).

2.2.2 Ekonomi

Secara umum ada 3 (tiga) faktor utama yang mempengaruhi kinerja pembangunan kota, (1) faktor geografis, (2) faktor demografis dan (3) faktor sosial ekonomi. Ketiga faktor tersebut biasanya terkait satu dengan lainnya, yang secara simultan mempengaruhi daya guna dan hasil guna pembangunan kota termasuk pilihan-pilihan penanaman modal (investasi). Sesuai dengan dinamika

pembangunan kota, luas wilayah administrasi Kota Medan telah melalui beberapa kali perkembangan. Pada Tahun 1951, Walikota Medan mengeluarkan Maklumat Nomor 21 tanggal 29 September 1951, yang menetapkan luas Kota Medan menjadi 5.130 Ha, meliputi 4 Kecamatan dengan 59 Kelurahan.

Maklumat Walikota Medan dikeluarkan menyusul keluarnya Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66/III/PSU tanggal 21 September tanggal 29 September 1951, yang menetapkan luas Kota Medan menjadi 5.130 Ha, meliputi 4 Kecamatan dengan 59 Kelurahan. Maklumat Walikota Medan dikeluarkan menyusul keluarnya Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 66/III/PSU tanggal 21 September 1951, agar daerah Kota Medan diperluas menjadi tiga kali lipat.

Melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1973 Kota Medan kemudian mengalami pemekaran wilayah menjadi 26.510 Ha yang terdiri dari 11 Kecamatan dengan 116 Kelurahan. Berdasarkan luas administrasi yang sama maka melalui Surat Persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 140/2271/PUOD, tanggal 5 Mei 1986, Kota Medan melakukan pemekaran Kelurahan menjadi 144 Kelurahan. Perkembangan terakhir berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Sumatera Utara Nomor 140.22/2772.K/1996 tanggal 30 September 1996 tentang pendefitipan 7 Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1992 tentang Pembentukan Beberapa Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Medan, secara administrasi Kota Medan dimekarkan kembali, dibagi atas 22 Kecamatan yang mencakup 151 Kelurahan. Berdasarkan

perkembangan administratif ini Kota Medan kemudian tumbuh secara geografis, demografis dan sosial.

Anggaran Belanja dan Transfer pemerintah di Sumatera Utara secara total mencapai Rp81,1 triliun pada tahun 2018. APBD Kabupaten/Kota merupakan kontributor terbesar dengan pangsa 48,18%. Pada triwulan I tahun 2018, realisasi anggaran pemerintah di Sumatera Utara mencapai 9,67% dari pagu anggaran. Pada tahun 2018, pagu anggaran belanja daerah Sumatera Utara secara agregat mengalami penurunan menjadi sebesar Rp81,19 triliun, atau turun sebesar (3,64%) dibandingkan pagu anggaran tahun 2017 yaitu sebesar Rp84,27 triliun. Pagu anggaran belanja daerah paling besar didominasi oleh anggaran belanja 31 kabupaten/kota dengan pangsa 48,18% atau sebesar Rp38,36 triliun. Kemudian disusul oleh pagu APBN dengan pangsa 36,37% atau sebesar Rp28,96 triliun, serta pagu anggaran belanja provinsi dengan pangsa 15,43% atau sebesar Rp12,29 triliun. Dari sisi realisasi, pada triwulan I 2018 belanja daerah Sumatera Utara secara agregat sebesar 9,48% dari pagu, meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun 2017 sebesar 6,40% dari pagu. APBD Provinsi Sumatera Utara Pagu anggaran pendapatan pada APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 sejak tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, pagu anggaran pendapatan meningkat 4,99% dibandingkan tahun 2017 menjadi sebesar Rp13,03 triliun yang didorong oleh peningkatan pagu anggaran pendapatan asli daerah sebesar 13,27% menjadi sebesar Rp5,73 triliun. Adapun pagu anggaran pendapatan APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 didominasi oleh pagu anggaran pendapatan transfer sebesar 55,96%. Sejalan dengan peningkatan pagu

anggaran pendapatan, pagu anggaran belanja pada APBD Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan sebesar 11,17% dibanding tahun 2017 menjadi sebesar Rp12,29 triliun. Kelompok pagu anggaran belanja yang mengalami peningkatan paling tinggi yaitu belanja operasi sebesar 15,54%. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan belanja barang dan jasa sebesar 16,94% yang merupakan pangsa ketiga terbesar dalam belanja operasi (24,40%). Belanja operasi masih menjadi pangsa terbesar anggaran belanja Pemerintah Provinsi Sumatera Utara sebesar 84,01%.

Pertumbuhan produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang Provinsi Sumatera Utara pada triwulan II tahun 2019 turun sebesar 7,96 persen jika dibandingkan periode yang sama tahun 2018 (y-on-y). Penurunan ini terutama disebabkan turunnya pertumbuhan produksi industri pengolahan tembakau sebesar 53,77 persen, industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya sebesar 14,92 persen dan industri makanan sebesar 14,87 persen. Pertumbuhan produksi industri manufaktur besar dan sedang (q-to-q) Provinsi Sumatera Utara di triwulan II tahun 2019 turun sebesar 2,36 persen jika dibandingkan produksi industri manufaktur besar dan sedang pada triwulan I tahun 2019. Jenis industri yang mengalami penurunan yaitu industri pengolahan tembakau sebesar 26,73 persen, industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenis sebesar 23,95 persen, dan industri karet, barang dari karet dan plastik sebesar 14,76 persen. Pertumbuhan produksi industri manufaktur mikro dan kecil Provinsi Sumatera Utara pada triwulan II-2019 naik sebesar 5,68 persen jika dibandingkan

periode yang sama tahun 2018 (y-on-y). Jenis industri yang mengalami kenaikan antara lain jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan sebesar 73,16 persen, industri alat angkutan lainnya sebesar 36,94 persen, dan industri pengolahan lainnya sebesar 26,48 persen. Pertumbuhan produksi industri manufaktur mikro dan kecil Provinsi Sumatera Utara di triwulan II-2019 naik sebesar 1,11 persen dibanding triwulan I-2019 (q-to-q). Jenis industri yang mengalami kenaikan antara lain jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan sebesar 41,86 persen, industri pengolahan lainnya sebesar 17,31 persen dan industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki sebesar 16,78 persen.

Pertumbuhan Industri Manufaktur Besar dan Sedang (y-on-y) triwulan II tahun 2019 turun sebesar 7,96 persen dibanding triwulan II tahun 2018. Penurunan ini disebabkan oleh turunnya pertumbuhan produksi di beberapa jenis industri di Sumatera Utara. Jenis industri yang mengalami penurunan antara lain industri : Pengolahan tembakau sebesar 53,77 persen, Kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya sebesar 14,92 persen, Makanan sebesar 14,87 persen, Farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional sebesar 12,39 persen dan Karet, barang dari karet dan plastik sebesar 3,70 persen.

Sementara jenis industri yang mengalami kenaikan pertumbuhan antara lain industri: Kertas dan barang dari kertas sebesar 70,19 persen. Minuman sebesar 21,23 persen dan Logam dasar sebesar 5,06 persen. Bila dibandingkan Triwulan I 2019 (q-to-q), produksi industri manufaktur besar dan sedang pada triwulan II tahun 2019 turun sebesar 2,36 persen. Penurunan ini disebabkan oleh

turunnya pertumbuhan produksi di beberapa jenis industri di Sumatera Utara. Jenis-jenis industri yang mengalami penurunan antara lain industri: Pengolahan tembakau sebesar 26,73 persen. Kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya sebesar 23,95 persen. Karet, barang dari karet dan plastik sebesar 14,76. Kertas dan barang dari kertas sebesar 6,36 persen. Farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional sebesar 5,56 persen dan Logam dasar sebesar 1,92 persen Sementara jenis industri yang mengalami kenaikan pertumbuhan antara lain industri: Minuman sebesar 21,77 persen dan Makanan sebesar 0,38 persen.

2.2.3 Administratif

Secara administratif , wilayah kota Medan hampir secara keseluruhan berbatasan dengan Daerah Kabupaten Deli Serdang, yaitu sebelah Barat, Selatan dan Timur. Sepanjang wilayah Utara nya berbatasan langsung dengan Selat Malaka, yang diketahui merupakan salah satu jalur lalu lintas terpadat di dunia. Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah yang kaya dengan Sumber Daya alam (SDA), Khususnya di bidang perkebunan dan kehutanan. Karenanya secara geografis kota Medan didukung oleh daerah-daerah yang kaya Sumber daya alam seperti Deli Serdang , Labuhan Batu, Simalungun, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Karo, Binjai dan lain-lain. Kondisi ini menjadikan kota Medan secara ekonomi mampu mengembangkan berbagai kerjasama dan kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan, saling memperkuat dengan daerah-daerah sekitarnya.

2.2.4 Kependudukan

Penduduk Kota Medan memiliki ciri penting yaitu yang meliputi unsur agama, suku etnis, budaya dan keragaman (plural) adapt istiadat. Hal ini memunculkan karakter sebagian besar penduduk Kota Medan bersifat terbuka. Secara Demografi, Kota Medan pada saat ini juga sedang mengalami masa transisi demografi.

Kondisi tersebut menunjukkan proses pergeseran dari suatu keadaan dimana tingkat kelahiran dan kematian tinggi menuju keadaan dimana tingkat kelahiran dan kematian semakin menurun.

2.2.5 Objek Wisata Kota Medan

Sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, kota Medan memiliki banyak lokasi pariwisata yang sangat potensial untuk di kembangkan. Kota yang berbasis pariwisata harus memiliki unsur pendukung yang sangat menentukan keberhasilan tercapainya tujuan-tujuan pembangunan yaitu: dukungan penuh dan komitmen dari pemerintah, peran serta masyarakat dan ketersediaan objek wisata potensial di tengah kota sebagai daya tarik utama kegiatan pariwisata. Dengan dukungan dari ketiga elemen ini maka kota berbasis pariwisata yang bernilai estetika dan ekonomis akan dapat diwujudkan.

Objek dan daya tarik wisata yang ada di Medan sangat banyak sekali, seperti Istana Maimoon, *tjong A fie mansion*, Penangkaran Buaya Asam Kumbang, Mesjid Raya, *Rahmat International Wildlife Museum and Gallery* Gereja Santa Maria Annai Velangkanni, Kuil Shri Mariamman, kuil Hindu tertua di tengah kota Medan menambah destinasi wisata di Kota Medan yang

multicultural.

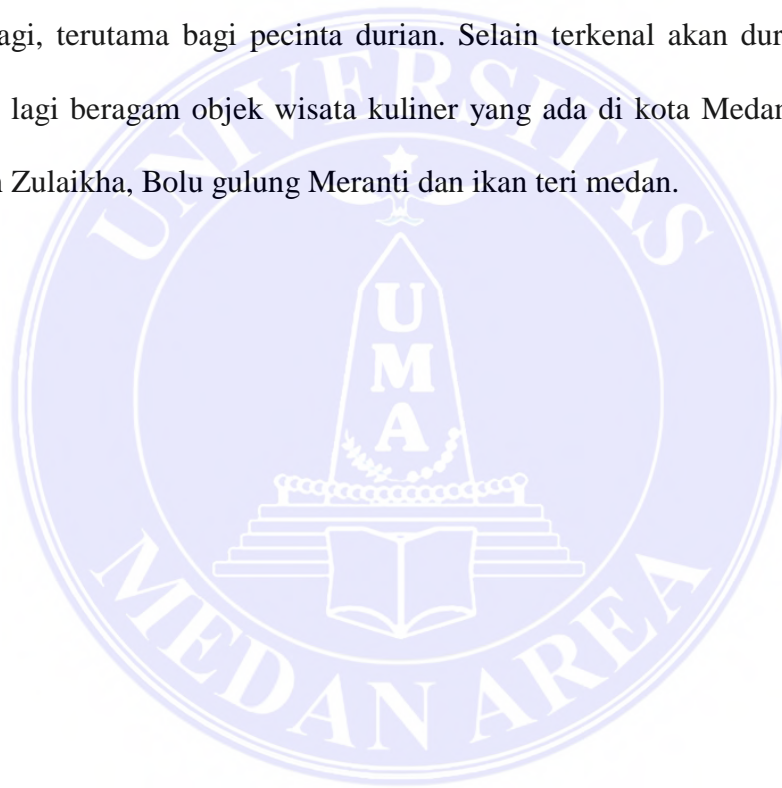
Secara spesifik pembangunan pariwisata kota yang berkelanjutan berprinsip pada terjaminnya sumber daya wisata dan sumber daya pendukung kesejahteraan masyarakatnya. Selain potensi fisik kota, pelestarian budaya (*culcute preservation*) dengan perpaduan berbagai etnis (*melting pot*), kearifan lokal (*tolerance*), gotong royong (*mutual cooperation*) serta pertunjukan budaya (*cultural performance*) menambah kekhasan dan kekayaan kota Medan. Dengan berbagai keunikan dan ciri khasnya yang menarik menjadikan kota Medan menjadi destinasi wisata yang komplit untuk dinikmati.

2.2.6 Wisata Kuliner Kota Medan

Salah satu jenis wisata yang sekarang sedang mengalami perkembangan pesat adalah wisata kuliner. Trend wisatawan sekarang yang datang ke suatu daerah wisata untuk mencari atau berburu makanan khas daerah tersebut menjadi peluang besar bagi daerah. Mereka tidak segan-segan membayar mahal untuk menikmati suatu hidangan. Perubahan gaya hidup masyarakat juga telah terjadi, mereka makan tidak hanya untuk mengenyangkan perut saja, tetapi mereka juga mencari suasana dan pelayanan yang prima sebagai bagian dari sajian makanan yang dipesan. Banyak wisatawan yang menyempatkan waktu berburu makanan dan minuman khas daerah tujuan di sela-sela kegiatannya berwisata.

Keberagaman suku yang berada di Kota Medan juga berpengaruh pada kuliner di kota Medan yang memiliki cita rasa unik hasil dari perpaduan beragam suku dan etnis tersebut. Di antara bangunan-bangunan bersejarah yang ada di kawasan Kesawan ini ada salah satu Restoran tua yaitu Tip Top Restaurant.

Uniknya restoran ini adalah masih mempertahankan bentuk bangunannya sejak dulu. Selain itu, tempat wisata kuliner yang banyak menarik pengunjung Karena lokasinya yang berada di jantung kota Medan dan dekat dengan stasiun Kereta Api membuat *Merdeka Walk* (MW) sangat mudah dijangkau. Tak hanya tempat makan, kawasan ini juga dilengkapi tempat bermain yang nyaman bagi anak-anak. Wisatawan lokal dan mancanegara yang datang ke Medan juga pasti tidak lupa untuk mencicipi atau membawa buah tangan yaitu Durian. Nama Ucok Durian tak asing lagi, terutama bagi pecinta durian. Selain terkenal akan duriannya, masih banyak lagi beragam objek wisata kuliner yang ada di kota Medan, seperti Bika Ambon Zulaikha, Bolu gulung Meranti dan ikan teri medan.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu suatu penelitian dengan melakukan wawancara secara mendalam. Peneliti memilih penelitian ini karena penelitian kualitatif bersifat menyeluruh (*holistic*), dinamis, dan mengeneralisasi. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian untuk melihat bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kepariwisata di Kota Medan.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Pariwisata Kota Medan (Jl.Prof.H.M.Yamin, SH No.40 Medan) dan Kantor BPD PHRI Sumut (Jl.Sisingamangaraja No.18 Medan).

3.3 Informan Penelitian

Adapun informan yang menjadi objek penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu informan kunci dan informan utama. Informan kunci adalah mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Sedangkan informan utama adalah mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang sedang diteliti. Adapun informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu :

1. Informan kunci merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Sebagai informan kunci yaitu

Kepala Bagian Umum Dinas Pariwisata. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti, salah satunya yaitu Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan.

2. Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Asosiasi Pariwisata yang akan menjadi informan utama adalah Sekretaris BPD PHRI Sumut.

3.4 Sumber Data

Dalam Penelitian ini pihak yang dijadikan sumber data adalah pegawai Dinas Pariwisata Medan, yang dianggap mempunyai informasi yang dapat menjelaskan mengenai bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam bidang perhotelan. Sedangkan data-data yang diperlukan terdiri dari:

1. Data Primer (khusus)

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari sumbernya, melalui observasi dan wawancara dengan sumber informasi terpilih. Hasil observasi disesuaikan kredibilitasnya dengan sumber data lain (data primer). Wawancara dilakukan dengan:

- a. Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan
- b. Sekretaris BPD PHRI Sumut

2. Data Sekunder (umum)

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya, melalui dokumen-dokumen atau catatan tertulis. Data yang tertulis bersumber pada dokumen, sehingga disebut data dokumenter, yaitu data atau

gambaran tentang lokasi penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

1) Teknik pengumpulan data primer

Teknik pengumpulan data primer yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data-data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik ini dilakukan melalui:

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan langsung kepada pihak yang terkait secara langsung dengan proses implementasi dalam Peraturan Daerah tentang Kepariwisata di Dinas Pariwisata kota medan.
- b. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek penelitian kemudian mencatat gejala-gejala yang dikemukakan di lapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan sebagai acuan dengan permasalahan penelitian.

2) Teknik pengumpulan data sekunder

Langkah pengumpulan data di dalam penelitian ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Studi kepustakaan atau studi literatur, yaitu teknik pengumpulan data dari buku-buku kepustakaan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
2. Teknik Dokumentasi, yaitu teknik pengambilan data dari dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan penelitian ini, seperti pengambilan sampel penelitian dari Dinas Pariwisata kota Medan. Studi dokumentasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari tempat penelitian yaitu,

buku, foto-foto, video, film dokumenter dan data yang relevan. Melalui data dokumentasi ini dapat diketahui data yang berhubungan dengan kasus yang di evaluasi baik yang berkaitan dengan perorangan, kelompok maupun instansi terkait.

3.6 Definisi Konseptual

Definisi konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Implementasi Kebijakan merupakan sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat dapat berupa Undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara.
- b) Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk rekreasi atau liburan dalam jangka waktu tertentu dari sebuah tempat ke tempat lain.
- c) Komunkasi yaitu penyampaian ide, program, dan gagasan pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara.
- d) Birokrasi merupakan suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hedak dicapai.
- e) Sumber Daya adalah suatu potensi yang dimiliki oleh materi atau unsur lain dalam kehidupan yang dapat memperlancar pelaksanaan (implementasi) suatu kebijakan.
- f) Disposisi ialah suatu keinginan, kemauan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan serta mewujudkan kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh.

3.7 Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2009), analisis terdiri dari 3 jalur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu :

- a **Reduksi data**, yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.
- b **Penyajian data**, yaitu mendisplaykan data. Melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.
- c **Penarikan kesimpulan**, yaitu dalam penelitian kualitatif, kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan ini sebagai hipotesis yang apabila didukung oleh data maka akan dapat menjadi teori.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Setelah meninjau, mempelajari dan menganalisis tentang Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 tahun 2014 dalam meningkatkan kepariwisataan di Kota Medan, maka penulis mengambil kesimpulan dan saran yang kelak dapat berguna bagi di Kota Medan dinas Pariwisata dan Asosiasi Pariwisata dalam menetapkan kebijaksanaan untuk memasarkan kepariwisataan di Kota Medan pada masa-masa yang akan datang.

Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 tahun 2014 tentang Kepariwisataan masih dalam proses tahap perbaikan. Dinas Pariwisata sudah mulai untuk berkomunikasi dengan stakeholder dan pihak terkait dalam implementasi Perda ini. Adanya kerjasama dengan Asosiasi Pariwisata daerah Kota Medan dalam Musrenbang dan kegiatan FGD lainnya.

Faktor-faktor yang memengaruhi dalam peningkatan kepariwisataan di Kota Medan antara lain dengan meningkatkan program sosialisasi terkait standarisasi para tenaga kerja industri dalam meningkatkan kualitas kepariwisataan di Kota Medan, kemudian merevitalisasi daerah objek wisata yang sudah ada sehingga para wisatawan ingin datang kembali ke Kota Medan serta membuka objek-objek wisata potensial yang dapat menarik minat pengunjung.

5.2. Saran

Dengan mengamati hasil penelitian dan kesimpulan, maka disusun saran yang diharapkan dapat membantu usaha peningkatan peran promosi di dalam mendorong pertumbuhan kepariwisataan Kota Medan sebagai berikut :

1. Promosi pariwisata memiliki peran penting di dalam dunia kepariwisataan, dimana dapat mempengaruhi jumlah / arus kunjungan wisatawan ke suatu daerah / negara apabila informasi yang disajikan adalah informasi yang baik dan menarik tentang suatu objek dan daya tarik wisata tersebut.
2. Agar dapat menjadikan Kota Medan sebagai kota wisata tentu saja terdapat beberapa faktor yang harus dibenahi dalam mengangkat citra pariwisata Kota Medan salah satunya adalah keseriusan pemerintah Kota Medan membenahi objek wisata di Kota Medan, mempromosikan objek wisata, dan memperbaiki infrastruktur yang belum optimal.
3. Kota Medan memiliki banyak potensi namun potensi ini menjadi tenggelam karena belum ada yang menggali. Salah satu cara untuk memulai penggalian potensi wisata Kota Medan sebagai ikon wisata Indonesia adalah dengan sedikit demi sedikit memperbaiki berbagai sarana dan prasarana. Jalan raya Kota Medan sudah saatnya mulai diprioritaskan. Selain itu, promosi tentang berbagai destinasi wisata Kota Medan selayaknya disebarakan di dunia maya dan dengan teratur selalu diperbaharui.
4. Kota Medan seharusnya mempunyai agenda pariwisata, misalnya menampilkan seni dan budaya etnis di kota itu khususnya Batak dan Melayu yang bisa ditonton wisatawan seperti halnya apabila wisatawan ke Yogyakarta

atau daerah lain. Jika pemerintah Kota Medan dapat mempersiapkan semuanya maka tak dapat dipungkiri bahwa Kota Medan akan menjadi tujuan wisata bagi para pengunjung dari seluruh mancanegara.

5. Pengembangan pariwisata tidak bisa terlepas dari sarana dan prasarana pendukungnya, sehingga pemerintah daerah dituntut untuk lebih memperhatikan apabila bisa maju dan berkembang. Keberhasilan pengembangan pariwisata ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu tersedianya obyek dan daya tarik wisata, adanya fasilitas aksesibilitas yaitu sarana dan prasarana yang memungkinkan wisatawan mengunjungi suatu daerah atau kawasan wisata dan tersedianya fasilitas amenities yaitu sarana kepariwisataan yang dapat memberikan kenyamanan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, maka sangat penting sekali sarana dan prasarana pendukung pariwisata dalam menunjang keberhasilan pengembangan pariwisata, sehingga merupakan suatu keharusan bagi pemerintah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka pengembangan pariwisata.

6. Perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kualitas sumber daya alam. Dalam hal ini sumber daya manusia memegang peranan yang penting dalam pengembangan pariwisata. Suatu kegiatan tanpa didukung oleh adanya sumber daya manusia yang berkualitas, maka akan banyak mengalami hambatan dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, James, L., 1979, *Public Policy Making* Holt, Rinehart and Winston; New York.

Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik, ed. 2*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

BPS (Badan Pusat Statistik).2019. *Berita Resmi Statistik*.
<http://sumut.bps.go.id/>.Diakses tanggal 10 April 2019.

BPS (Badan Pusat Statistik).2019. *Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Sumatera Utara Triw II-2019* No. 44/08/12/Thn. XXII.
<http://sumut.bps.go.id/>.Diakses tanggal 10 April 2019.

Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. 2018. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan Regional Provinsi Sumatera Utara*. Medan: Tim Asesmen dan Advisory Sumut.

Daima Oshika Chandra, P. A. (2017). Implementasi Kebijakan Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pariwisata Di Era Masyarakat Ekonomi Asean (Studi Kasus di Dinas Sosial Tenaga Kerja Kabupaten Bandung). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara Universitas Udayana Bali*.

Defny Holidin, D. H. (2016). *Reformasi Birokrasi dalam Transisi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Dunn, N. William. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Jakarta: Gajah Mada University Press.

Edward III, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press.

Febianti, I. N. (2017). Analisis dampak perkembangan pariwisata terhadap perilaku konsumtif masyarakat wilayah bali selatan. *Jurnal Kepariwisata dan Hospitalis* .

Gamal, S. (2002). *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Grindle, Merilee S., (ed), 1980, *Politics and Apolicy Implementation in the Third Word*, New Jersey: Princetown University Press
HR, R. (2008). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Hukum Administrasi Negara.Jakarta: Raja

Grafindo Persada.

Irawan, E. (Th VII. Nomor 2, Juli-Desember- 2015). Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Banyuwangi. *Jejaring Administrasi Publik*, 757-758.

Islamy, I. (2009). *Prinsip- prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jogiyanto, 2001, *Analisis dan Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis*, Yogyakarta: ANDI.

Kompas Media Online. <https://travel.kompas.com>. *Wisata Kuliner Kota Medan* Diakses pada tanggal 10 Maret 2019.

Mulyadie. (2015). Implementasi Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kawasan Telu Palu. *e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 8, Agustus*, 90-94.

Priwisata, K. (2017). *Akuntabiliitas Kinerja Kementerian Pariwisata Tahun 2017*. Jakarta: Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.

Subakti, F. (2013). Impelementasi Kebijakan Tera Ulang di Kabupaten Kota Baru. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal, Volume II Edisi 1, Januari- Juni* , 5.

Sumardi. (Edisi Vol. III No. I Januari – April 2014). Analisis Kebijakan Publik Terhadap Perubahan Masa Depan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Amanah*, 60.

Surbakti, A. (2012). Pusaka Budaya Dan Pengembangan Pariwisata, Di Kota Medan: Sebuah Kajian Budaya. *Jurnal Pariwisata Universitas Udayana Bali*.

Surono. 2013. *Kebijakan Sertifikasi Profesi Pariwisata Nasional. Makalah yang disampaikan pada Seminar SDM Pariwisata Indonesia Program Pascasarjana STP Trisakti*, Jakarta 23 November 2013.

Tangkilisan, Hessel Nogi. 2003. *Kebijakan Publik yang Membumi*. Yogyakarta. Lukman Offset.

Victoria Lelu Sabon, M. T. (2018). Strategi Peningkatan Kinerja Sektor Pariwisata Indonesia, Pada Asean Economic Community. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 172.

Wahab, Solichin Abdul, DR, MA. 1997. *Analisis Kebijaksanaan*, Jakarta: Bumi Aksara.

Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan Publik (Teori dan Proses)*. Yogyakarta: Media Presindo.

Yoeti, Oka A. 1985, *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Bandung: Angkasa.

Peraturan Perundang-Undangan

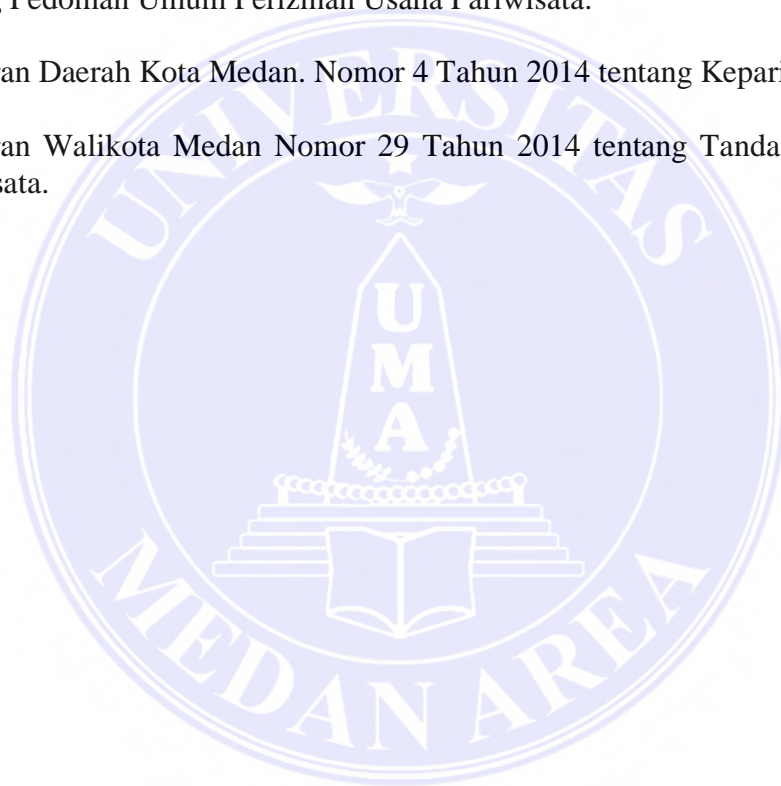
Undang Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan.

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata.

Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KEP-012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata.

Peraturan Daerah Kota Medan. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Kepariwisataan.

Peraturan Walikota Medan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata.



Lampiran 1. Surat Keterangan Selesai Penelitian



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 26/4/21

Access From (repository.uma.ac.id)26/4/21

Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian



Gambar 1. Selesai wawancara dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Medan (7 Maret 2019)



**Gambar 2. Wawancara dengan Sekretaris BPD PHRI Sumut
(9 Maret 2019)**